



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

2025 LAPORAN MONITORING

Capaian Kinerja Triwulan I

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KATA PENGANTAR

Terselenggaranya Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan pra syarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Untuk hal ini diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Guna memenuhi hal tersebut, maka sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025.

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan I Tahun 2025 ini dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan.

Selain berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance dalam perspektif yang lebih luas, Laporan Monitoring Capaian Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Triwulan I Tahun 2025 juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur serta kepada masyarakat/publik.

Akhirnya dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Instansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Triwulan I Tahun 2025 dapat diselesaikan. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Kalimantan Timur ini kami ucapkan terima kasih, semoga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Samarinda, 03 April 2025



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Kinerja Triwulan I Tahun 2025	1
B. Realisasi Anggaran	9
BAB II PERMASALAHAN, REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT	
A. Permasalahan, Rekomendasi dan Tindak lanjut	14
BAB III PENUTUP	17
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Table 1.1	Perjanjian Kinerja	1
Table 1.2	Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025.....	2
Table 1.3	Data Potensi Konflik Ipoleksosbud Triwulan I Tahun 2025	5
Table 1.4	Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja Triwulan I Tahun 2025.....	9
Table 1.5	Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan pada Triwulan I Tahun 2025.....	10
Table 2.1	Permasalahan, Rekomendasi dan Tindak Lanjut.....	14

BAB I

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, Badan Hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan Misi Organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada masukan, keluaran, dan hasil.

Dari pengukuran kinerja akan dapat dilakukan penilaian proses penyusunan Kebijakan/Program/Kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Adapun Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur yang telah ditetapkan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KON DISI AWA L	TARGET KINERJA THN 2025	TARGET KERJA TRIWULAN				
							I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"	1.Peningkatan Kualitas Manusian Indonesia; 2.Struktur Ekonomi yang Produktif, Merata dan Berdaya Saing;	Terwujudnya masyarakat Kalimantan Timur yang demokratis		Indeks Demokrasi Indonesia Kalimantan Timur	81,02	81,15	25	25	31,15		
	3.Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; 4.Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelaanjutan ;	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat		Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	77,90	78,10	25	25	28,10	0	
	5.Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;	Meningkatnya persatuan dan kesatuan masyarakat		Jumlah potensi konflik ipoleksbud	31	90	22,5	22,5	22,5	22,5	
	6.Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya; 7.Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan	Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas		Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	74,26	75,50	0	37,75	0	37,75	
				Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	66,97	68,50	0	68,50	0	0	

	Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; 8.Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; 9.Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

- a. Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur pada Triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan sebelumnya, maka perlu dilakukan perhitungan untuk mengetahui capaian kinerja yang dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur. Rumus yang digunakan dalam menghitung capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pengukuran Kinerja (Positif)} = \text{Realisasi}/\text{Target} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Pengukuran Kinerja (Negatif)} = \text{Target} - (\text{Realisasi}-\text{Target})/\text{Target} \times 100\%$$

Tabel 1.2
Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	25	25	100
2	Meningkatnya persatuan dan kesatuan masyarakat	Jumlah potensi konflik ipoleksosbud	22,5	12	146,67
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	0	0	100
		Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	0	0	100

1. Sasaran Strategis pertama : Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat.

Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja yaitu Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi di Kalimantan Timur, dimana dalam upaya pencapaiannya didukung oleh 1 (satu) program, yaitu : Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan

Pengembangan Etika Serta Budaya Politik. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, yakni:

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik. Dengan Sub kegiatan :

1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

Sasaran ini dicapai melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Skor IDI Aspek Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan (Nilai/Angka).

Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi di Kalimantan Timur merupakan salah satu aspek dalam perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Kalimantan Timur. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan delapan indikator demokrasi, yaitu Kinerja Lembaga Demokrasi, Kinerja Lembaga Yudikatif, Netralisasi Penyelenggara Pemilu, Putusan pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah, Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat, Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik. Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi di Kalimantan Timur tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja. Namun, Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi Kalimantan Timur juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan, dan penegak hukum. Oleh karena itu,

perkembangan Indeks Demokrasi Kalimantan Timur merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat.

Angka Indeks Kapasitas Lembaga Kalimantan Timur merupakan indikator untuk mengukur tingkat perkembangan dan kemajuan indikator pembangunan demokrasi. Rilis Indeks Demokrasi Kalimantan Timur dilakukan setiap tahun, Indeks Demokrasi Kalimantan Timur dirilis H+1 dari tahun berkenan, sehingga Indeks Demokrasi Kalimantan Timur yang disajikan pada laporan ini merupakan Indeks Kapasitas Lembaga Kalimantan Timur Tahun 2024.

Secara spesifik, aspek-aspek demokrasi yang diukur dalam I Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi Kalimantan Timur adalah Kebebasan Sipil (7 indikator di dalamnya), Aspek Kesetaraan (7 indikator) serta Aspek Lembaga Demokrasi (8 indikator). Hasil Indeks Demokrasi Kalimantan Timur disampaikan dalam bentuk angka dari 0 yang paling rendah sampai dengan 100 yang paling tinggi. Angka ini dibagi dalam kategori kualitas capaian sebagai berikut: 60< Buruk; 60-80 Sedang; >80 Baik.

Program/kegiatan yang mendukung capaian sasaran strategis meningkatnya partisipasi politik masyarakat pada triwulan I tahun 2025 antara lain:

1. Kegiatan Coffe Morning dilaksanakan di Hotel Fugo Samarinda pada tanggal 22 Januari 2025 dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang.
2. Kegiatan Rapat Kerja Tenisi Bidang Poldagri dilaksanakan di Hotel Midtown Samarinda pada tanggal 30 Januari 2025 dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang.
3. Kegiatan Rapat Pembahasan Kenaikan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Paser dilaksanakan di Ruang Kersik Luway Kantor Badan Kesbangpol Prov.Kaltim Lantai 2 pada tanggal 31 Januari 2025 dengan jumlah peserta sebanyak 25 orang.
4. Kegiatan Rapat Revisi Anggaran Hibah Pilkada Tahun 2024 dilaksangkan di Ruang Bina Masyarakat Kantor Badan Kesbangpol Prov.Kaltim Lantai 2 pada tanggal 25 Februari 2025 dengan jumlah peserta sebanyak 15 orang.
5. Kegiatan Rapat Pembahasan Adendum NPHD Pemilihan Gubernur Tahun 2024 dilaksanakan di Ruang Bina Masyarakat Kantor Badan Kesbangpol Prov.Kaltim Lantai 2 pada tanggal 3 Maret 2025 dengan jumlah peserta 25 orang

6. Kegiatan Rapat Pembahasan Permohonan Bantuan Anggaran PSU Kabupaten Mahakam Ulu dilaksanakan di Ruang Kersik Luway Kantor Badan Kesbangpol Prov.Kaltim Lantai 2 pada tanggal 17 Maret 2025 dengan jumlah peserta 15 orang.
7. Kegiatan Rapat Pembahasan Perubahan RAB Hibah Bawaslu dan KPU Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan di Ruang Kersik Luway Kantor Badan Kesbangpol Prov.Kaltim Lantai 2 pada tanggal 21 Maret 2025 dengan jumlah peserta 25 orang.

2. Sasaran Strategis Kedua : Meningkatnya Persatuan dan Kesatuan Masyarakat.

Sasaran ini dicapai melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu : Jumlah Potensi Konflik Ipoleskosbud, dimana dalam upaya pencapaiannya didukung oleh 3 (tiga) program, yaitu : Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan, Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya dan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial. Program ini terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 16 (enam belas) sub kegiatan.

Data Potensi Konflik Ipoleskosbud Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.3
Data Potensi Konflik Ipoleskosbud Triwulan I Tahun 2025**

No	Kabupaten/Kota	Potensi Konflik	Jenis Potensi Konflik	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Kota Bontang	Aliran jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang ada di Kota Bontang berjumlah 50 orang jamaah, berencana mendaftarkan ke Kesbangpol.	Ideologi	Aliran Ahmadiyah pada tahun 2005 berdasarkan fatwa MUI adalah aliran sesat dan menyesatkan. Th 2024 pertemuan tahunan JAI di Kab Kuningan Prov Jateng mendapat penolakan Masyarakat.
2	Kota Balikpapan	Ormas Gepak Kuning, LPADKT-KU dan Baladika Mulawarman melakukan aksi unjuk rasa damai dan melakukan aksi	Sosbud	Penolakan masih terus dilakukan.

		sweeping terhadap atribut ormas GRIB JAYA dan melakukan orasi di depan Kantor DPRD Kota Balikpapan		
3	Kabupaten Berau	RDP antara DPRD Berau dengan PT. Berau Coal terkait pemutusan hubungan kerja massal.	Sosbud	Dalam proses pengadilan
4	Kabupaten Kutai Kartanegara	PT. TSB, PT. SUAN, PT.MDP dengan pengurus persatuan petani kelapa sawit muara badak (PPKS) mengeluhkan akrena PT. SUAN tidak beroperasi dan tutup total sehingga masyarakat sebagai mitra kesulitan dalam menjual hasil panen sawit, meminta agar PT SUAN beroperasi Kembali.	Sosbud	Pengurus petani sudah bersurat ke DPRD Kukar agar difasilitasi pertemuan dengan PT. SUAN
5	Kota Samarinda	Unjuk rasa Gabungan supporter Borneo FC menuntut agar GOR Segiri digunakan pada liga 1 BRI 2025 dan mengancam akan melakukukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kaltim jika tuntutan tidak dipenuhi	Sosbud	Dalam proses pengendalian
6	Kota Samarinda	Aliansi mahasiswa Kaltim menggugat dan menolak RUU Minerba, menolak izin usaha pertambangan bagi perguruan tinggi.	Sosbud	Dalam proses pengendalian
7	Kota Samarinda	Penolakan warga Masyarakat kelurahan Sungai kledeng terhadap rencana Pembangunan gereja toraja bukit harapan loa janan cabang kebaktian Sungai keledang.	Ideologi	Dalam proses pengendalian
8	Kota Bontang	Masyarakat menuntut PT. PHSS (Pertamina Hulu Sanga-Sanga) agar memberikan tali asih kepada 299 anggota persatuan bididaya kerrang dara yang	Sosial	Dalam proses pengendalian

		terdampak atas dugaan limbah hasil pengeboran RIG GWDC 16 yang berada di projek PHSS.		
9	Kabupaten Penajam Paser Utara	Aliansi peduli nelayan kerring dara (APNKD) menuntut PT. PHSS melakukan Ganti rugi terhadap nelayan yang terdampak atas pencemaran limbah yang membuat karang dara mati secara massal.	Sosial	Dalam proses pengendalian
10	Kota Samarinda	Aliansi Masyarakat Pelabuhan maritim/tenaga kerja bongkar muat samarinda menuntut penutupan alur Sungai Mahakam.	Sosial	Dalam proses pengendalian
11	Kabupaten Kutai Timur	Kelompok tani gunung jepu-jepu menuntut agar PT. Kobexindo Coment membayar Ganti rugi lahan kelompok tani jepu-jepu Bersatu.	Sosial	Dalam proses pengendalian
12	Kabupaten Paser	Aliansi honorer menolak kebijakan pemunduran penerbitan SK PNS dan PPPK	Sosial	Dalam proses pengendalian

Program yang mendukung capaian sasaran strategis Meningkatnya Persatuan dan Kesatuan Masyarakat pada triwulan I tahun 2025 antara lain:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan. Kegiatan yang menunjang capaian sasaran triwulan I tahun 2025 adalah sebagai berikut:
 1. Kegiatan Rapat Kerja Teknis perihal Rapat Pembentukan Paskibraka 2025, dilaksanakan di Ruang Bina Masyarakat Kantor Badan Kesbangpol Prov.Kaltim Lantai 2 pada tanggal 11 Februari 2025, dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang.
 2. Sosialisasi Rapat Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Kalimantan Timur pada triwulan I tahun 2025, dilaksanakan di Ruang Bina Masyarakat Kantor Badan Kesbangpol Prov.Kaltim Lantai 2 pada tanggal 4 Maret 2025, dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang.

2. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Kegiatan yang menunjang capaian sasaran pada triwulan I tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan coffe morning dengan ormas di Samarinda, dilaksanakan di Decafe Samarinda, dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang.
 2. Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan Ormas di Kota Balikpapan, dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2025 dengan jumlah peserta sebanyak 60 Peserta.
 3. Kegiatan coffe morning dengan ormas di Samarinda, dilaksanakan di Decafe Samarinda pada tanggal 28 Februari 2025, dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang.
-
3. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial. Kegiatan yang menunjang capaian sasaran pada triwulan I tahun 2025 adalah sebagai berikut:
 1. Kegiatan Rapat Tim Terpadu Penangana Konflik Sosial Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan di Decafe Samarinda pada tanggal 05 Februari 2025 dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang.
 2. Kegiatan Sosialisasi Peran Intelektual Muda Dalam Pencegahan Radikalisme dan Terorisme di Kalimantan Timur dilaksanakan di Hotel Bintang Sintuk – Bontang pada tanggal 12 Februari 2025 dengabn jumlah peserta sebanyak 100 orang.

3. Sasaran Strategis Ketiga : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah.

Sasaran ini dicapai melalui 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu : Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

3.1 Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah pada triwulan I tahun 2025 dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat daerah adalah sebesar 100%, yaitu realisasi 0 dari target 0. Capaian ini sudah seuai dengan target yang ditetapkan, triwulan pertama merupakan tahapan dalam perhitungan SKM yang dilaksanakan pada akhir semester pertama yaitu bulan juni 2025.

3.2 Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah pada triwulan I tahun 2025 dengan Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah sebesar 100%, yaitu realisasi 0 dari target 0. Capaian ini sudah seuai dengan target yang ditetapkan, triwulan pertama merupakan tahapan dalam penilaian SAKIP, nilai akhir SAKIP oleh Inspektorat diterima paling lambat triwulan dua Tahun 2025.

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran yang telah digunakan pada triwulan I tahun 2025 untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Berikut ini disajikan realisasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur pada triwulan I tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 1.4
Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	25	25	100	65.478.442.131,00	71.328.100,00	0,11%
2	Meningkatnya persatuan dan kesatuan masyarakat	Jumlah potensi konflik ipoleksosbud	22,5	12	146,47	16.840.117.374,00	324.746.138,00	1,93%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	0	0	100	21.128.680.495,00	2.241.032.717,00	2,24%
		Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	0	0	100			
Jumlah						103.447.240.000,00	2.637.106.955,00	2,55%

Adapun realisasi anggaran pada masing-masing program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kaltim pada triwulan I tahun 2025 dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:

Tabel 1.5
**Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan pada Triwulan I Tahun
2025**

No	Program/Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target TW I	Realisasi TW I	%	
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.128.680.495	2.241.032.717	10,61	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	688.897.112	-	0,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.672.808	-	0,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1.521.404	-	0,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.001.404	-	0,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.001.404	-	0,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	451.146.728	-	0,00	
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	211.553.364	-	0,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.397.929.294	1.841.340.720	14,85	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.829.909.638	1.739.280.720	14,70	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	476.760.000	102.060.000	21,41	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.888.424	-	0,00	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	741.404	-	0,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	86.368.424	-	0,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.261.404	-	0,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	183.817.722	-	0,00	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	481.404	-	0,00	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	180.370.702	-	0,00	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.482.808	-	0,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.482.808	-	0,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	111.417.712	-	0,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	50.233.500	-	0,00	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	481.404	-	0,00	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	481.404	-	0,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60.221.404	-	0,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.406.720.820	126.620.564	3,72	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.386.618	-	0,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	793.261.304	-	0,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	145.167.700	1.945.400	1,34	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.941.087.450	124.675.164	6,42	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	289.521.404	-	0,00	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	235.296.344	-	0,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.056.830.404	-	0,00	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.881.793.386	-	0,00	
	Pengadaan Mebel	175.037.018	-	0,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	915.886.432	259.370.243	28,32	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.034.000	-	0,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	181.735.120	14.721.319	8,10	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	704.117.312	244.648.924	34,75	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	367.180.999	13.701.190	3,73	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72.741.999	5.950.200	8,18	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	154.939.000	7.750.990	5,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.800.000	-	0,00	
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	99.700.000	-	0,00	
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	10.373.098.516	103.942.950	1,00	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	10.373.098.516	103.942.950	1,00	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.349.128.354	24.498.865	1,82	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	171.668.424	17.241.900	10,04	
	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	218.634.006	-	0,00	
	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	461.253.510	20.290.000	4,40	
	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	2.404.833.270	-	0,00	
	Pelaksanaan tugas Paskibraka	4.482.601.540	-	0,00	
	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	54.905.980	-	0,00	
	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	255.669.006	-	0,00	
	Pembentukan Paskibraka	974.404.426	41.912.185	4,30	
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA	65.478.442.131	71.328.100	0,11	

	PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	65.478.442.131	71.328.100	0,11	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	65.037.110.403	600.000	0,00	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	441.331.728	70.728.100	16,03	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1.359.680.314	73.909.302	5,44	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.359.680.314	73.909.302	5,44	
	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1.174.860.728	73.049.302	6,22	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	184.819.586	860.000	0,47	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.367.982.119	17.374.322	1,27	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1.367.982.119	17.374.322	1,27	
.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.230.775.937	15.603.322	1,27	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	137.206.182	1.771.000	1,29	
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	3.739.356.425	129.519.564	3,46	

	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	3.739.356.425	129.519.564	3,46	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.606.719.885	105.775.360	6,58	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	241.200.000	12.120.300	5,03	
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1.891.436.540	11.623.904	0,61	
	Total Belanja Daerah	103.447.240.000	2.637.106.955,00	2,55	

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa realisasi keuangan per program kegiatan mencapai 2,55% hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program kegiatan sudah terealisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

BAB II
PERMASALAHAN, REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

A. Kendala Permasalahan, Rekomendasi dan tindak lanjut

Pada Triwulan I Tahun Anggaran 2025, dari segi pencapaian kinerja yang akan dicapai, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai jadwal, namun ada beberapa kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

Untuk lebih jelas Permasalahan, Rekomendasi dan Tindak Lanjut tertuang dalam table sebagai berikut:

Tabel 2.1
Permasalahan, Rekomendasi dan Tindak Lanjut

No	Uraian	Permasalahan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	a. Belanja modal masih proses pemilihan penyedia, pengiriman dan pembayaran. b. Belanja barang dan jasa yang masih dalam proses pertanggungjawaban dan pembayaran. c. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi, b. Untuk Kegiatan rutin kantor, realisasi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan.	a. Segera menyelesaikan pemilihan penyedia. b. Segera menyelesaikan kelengkapan administrasi dan pembayaran. c. Segera menyelesaikan pemilihan penyedia.	a. Akan segera menyelesaikan pemilihan penyedia pada triwulan selanjutnya. b. Berkas administrasi akan segera diselesaikan.
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	a. Adanya efisiensi anggaran sehingga menggeser anggaran b. Dalam pelaksanaan kegiatan mengalami kesulitan menemukan tempat dengan kapasitas besar dengan fasilitas pendukung yang layak.	Agar dapat menyesuaikan Kembali jadwal pelaksanaan kegiatan	Pelaksanaan kegiatan segera dilaksanakan
3	Program Peningkatan Peran partai Politik dan Lembaga	a. Adanya efisiensi anggaran sehingga	a. Agar segera menyesuaikan	Akan dilaksanakan koordinasi dengan

	Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	<p>menggeser anggaran</p> <p>b. Dalam pelaksanaan kegiatan mengalam kesulitan menemukan tempat dengan kapasitas besar dengan fasilitas pendukung yang layak.</p> <p>c. Bantuan keuangan kepada partai politik belum bisa dilaksanakan karena LHP dari BPK belum diterbitkan.</p> <p>d. Terdapat perubahan penggunaan hibah kepada instansi vertical berdasarkan usulan yang bersangkutan.</p>	<p>Kembali jadwal kegiatan.</p> <p>b. Agar segera berkoordinasi dengan BPK terkait LHP Bankeu Parpol</p>	instansi vertikal
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	<p>a. Adanya efisiensi anggaran sehingga menggeser anggaran</p> <p>b. Dalam pelaksanaan kegiatan mengalam kesulitan menemukan tempat dengan kapasitas besar dengan fasilitas pendukung yang layak.</p>	<p>a. Agar dapat menyesuaikan Kembali jadwal pelaksanaan kegiatan</p> <p>b. Agar segera melakukan pergeseran anggaran</p>	Mengubah jadwal kegiatan/rencana aksi sesuai dengan hasil pergeseran anggaran
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	<p>a. Adanya efisiensi anggaran sehingga menggeser anggaran</p> <p>b. Dalam pelaksanaan kegiatan mengalam kesulitan menemukan tempat dengan kapasitas besar dengan fasilitas pendukung yang layak.</p>	<p>a. Agar dapat menyesuaikan Kembali jadwal pelaksanaan kegiatan</p> <p>b. Agar segera melakukan pergeseran anggaran</p>	Mengubah jadwal kegiatan/rencana aksi sesuai dengan hasil pergeseran anggaran
6	Program Peningkatan	a. Adanya efisiensi	a. Agar dapat	Mengubah jadwal

	Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik	<p>anggaran sehingga menggeser anggaran</p> <p>b. Dalam pelaksanaan kegiatan mengalam kesulitan menemukan tempat dengan kapasitas besar dengan fasilitas pendukung yang layak.</p> <p>c. Masih banyak penyedia UMKM non PKP</p> <p>d. Masih banyak penyedia belum membuat akun lpse v6</p>	<p>menyesuaikan Kembali jadwal pelaksanaan kegiatan</p> <p>b. Agar segera melakukan pergeseran anggaran</p>	kegiatan/rencana aksi sesuai dengan hasil pergeseran anggaran
--	---	--	---	---

BAB III
P E N U T U P

Hasil dari capaian sasaran strategis yang telah dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, dari 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan telah dapat dilaporkan perkembangan capaiannya.

Secara keseluruhan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur pada triwulan I tahun 2025 dalam kategori sangat baik, namun harus diakui masih banyak kendala dan permasalahan yang dihadapi karena itu untuk meningkatkan kinerja pada triwulan berikutnya.

Demikian Laporan Capaian Kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Triwulan I Tahun 2025 disusun, dengan harapan dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana berakuntabilitas sesuai amanat yang telah diemban dan menjadi sarana umpan balik bagi peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur di masa yang akan datang dan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Samarinda, 03 April 2025



LAMPIRAN

TRIWULAN I TAHUN 2025

**LAPORAN SASARAN KINERJA RPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DAN IKU RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALTIM
BULAN JANUARI-MARET 2025**

NO.	TUJUAN / SASARAN RPD	TOLAK UKUR / INDIKATOR KERJA	TARGET		URAIAN / PERHITUNGAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
			VOL	SATUAN			
1	Tujuan : Terwujudnya masyarakat Kalimantan Timur yang demokratis	Indeks Demokrasi Indonesia Kalimantan Timur	81,15	Indeks	$I(X_{ijk}) = \frac{(X_{ijk} - X_{terburuk})}{(X_{ideal} - X_{terburuk})} \times 100$	25	30,81
1,1	Sasaran : Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	78,00	Indeks	$I(X_{ijk}) = \frac{(X_{ijk} - X_{terburuk})}{(X_{ideal} - X_{terburuk})} \times 100$	25	32,05
1,2	Sasaran : Meningkatnya persatuan dan kesatuan masyarakat	Jumlah potensi konflik Ipolesosbud	90,00	Jumlah	Jumlah hasil pemantauan di lapangan potensi konflik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya	12	186,67
2	Tujuan : Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks kepuasan masyarakat pemerintah daerah	85,50	Indeks	Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur	0	0,00
		Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	79,30	Nilai	Indeks Kepuasan Masyarakat = (Nilai Unsur Pelayanan × Bobot)	0	0,00
2,1	Sasaran: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	75,50	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat = (Nilai Unsur Pelayanan × Bobot) × Nilai Dasar	0	0,00
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	68,50	Nilai	Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur	0	0,00

NO.	SASARAN STRATEGIS	TOLAK UKUR / INDIKATOR KERJA	TARGET		URAIAN / PERHITUNGAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
			VOL	SATUAN			
1	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	78,00	Indeks	$I(X_{ijk}) = \frac{(X_{ijk} - X_{terburuk})}{(X_{ideal} - X_{terburuk})} \times 100$	0	0,00
2	Meningkatnya persatuan dan kesatuan masyarakat	Jumlah potensi konflik Ipolesosbud	90	Jumlah	Jumlah hasil pemantauan di lapangan potensi konflik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya	3	196,00

3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	75,50	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat = (Nilai Unsur Pelayanan × Bobot) × Nilai Dasar	0	0,00
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	75,50	Poin	Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur	0	0,00

REKAP REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN								
No.	IKU / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		ANGGARAN			PENANGGUNG JAWAB
			REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	
1	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	0	0,00	65.478.442.131,00	71.328.100,00	0,11	Drs. H. Sufian Agus, M.Si
1.1	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA	Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	0,00	0,00	65.478.442.131,00	71.328.100,00	0,11	Fatimah Waty, SE.,MM.
1.1.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang demokratis	0,00	0,00	65.478.442.131,00	71.328.100,00	0,11	Fatimah Waty, SE.,MM.

1.1.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	0	0,00	65.037.110.403,00	600.000,00	0,00	Fatimah Waty, SE.,MM.
1.1.1.2	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	0	0,00	441.331.728,00	70.728.100,00	16,03	Fatimah Waty, SE.,MM.
2	Meningkatnya persatuan dan kesatuan masyarakat	Jumlah potensi konflik Ipolesosbud	3,00	196,00	16.840.117.374,00	324.746.138,00	1,93	Drs. H. Sufian Agus, M.Si
2.1	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Percentase elemen masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	0	0,00	10.373.098.516,00	103.942.950,00	1,00	Syarifuddin Noor, SH
2.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Kebangsaan	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	0	0,00	10.373.098.516,00	103.942.950,00	1,00	Syarifuddin Noor, SH
2.1.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0	0,00	1.349.128.354,00	24.498.865,00	1,82	Syarifuddin Noor, SH

2.1.1.2	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0	0,00	171.668.424,00	17.241.900,00	10,04	Syarifuddin Noor, SH
2.1.1.3	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	0	0,00	218.634.006,00	0,00	0,00	Syarifuddin Noor, SH
2.1.1.4	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	0	0,00	461.253.510,00	20.290.000,00	4,40	Syarifuddin Noor, SH
2.1.1.5	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	0	0,00	2.404.833.270,00	0,00	0,00	Syarifuddin Noor, SH
2.1.1.6	Pelaksanaan tugas Paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	0	0,00	4.482.601.540,00	0,00	0,00	Syarifuddin Noor, SH
2.1.1.7	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	0	0,00	54.905.980,00	0,00	0,00	Syarifuddin Noor, SH
2.1.1.8	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	0	0,00	255.669.006,00	0,00	0,00	Syarifuddin Noor, SH
2.1.1.9	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	0	0,00	974.404.426,00	41.912.185,00	4,30	Syarifuddin Noor, SH
2.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWSAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi masyarakat yang terdaftar dan aktif	0	0,00	1.359.680.314,00	73.909.302,00	5,44	Tri Atmaji, S.Sos., M.Si.
2.2.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	0	0,00	1.359.680.314,00	73.909.302,00	5,44	Tri Atmaji, S.Sos., M.Si.

2.2.1.1	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	0	0,00	1.174.860.728,00	73.049.302,00	6,22	Tri Atmaji, S.Sos., M.Si.
2.2.1.2	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	0	0,00	184.819.586,00	860.000,00	0,47	Tri Atmaji, S.Sos., M.Si.
2.3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan asema	0	0,00	1.367.982.119,00	17.374.322,00	1,27	Tri Atmaji, S.Sos., M.Si.
2.3.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	0	0,00	1.367.982.119,00	17.374.322,00	1,27	Tri Atmaji, S.Sos., M.Si.
2.3.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0	0,00	1.230.775.937,00	15.603.322,00	1,27	Tri Atmaji, S.Sos., M.Si.
2.3.1.2	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0	0,00	137.206.182,00	1.771.000,00	1,29	Tri Atmaji, S.Sos., M.Si.
2.4	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi konflik sosial yang ditangani	0	0,00	3.739.356.425,00	129.519.564,00	3,46	Wildan Taufik, S.Pd., M.Si.

2.4.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	0	0,00	3.739.356.425,00	129.519.564,00	3,46	Wildan Taufik, S.Pd., M.Si.
2.4.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0	0,00	1.606.719.885,00	105.775.360,00	6,58	Wildan Taufik, S.Pd., M.Si.
2.4.1.2	Penyebarluasan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0	0,00	241.200.000,00	12.120.300,00	5,03	Wildan Taufik, S.Pd., M.Si.
2.4.1.3	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	0	0,00	1.891.436.540,00	11.623.904,00	0,61	Wildan Taufik, S.Pd., M.Si.
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	0	0,00	21.128.680.495,00	2.241.032.717,00	10,61	Drs. H. Sufian Agus, M.Si
		Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	0	0,00				Drs. H. Sufian Agus, M.Si
3.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	1,95	2,48	21.128.680.495,00	2.241.032.717,00	10,61	Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.
		Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100,00	100,00				
3.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	0,00	0,00	688.897.112,00	0,00	0,00	Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.
3.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	0,00	22.672.808,00	0,00	0,00	Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.
3.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0,00	0,00	1.521.404,00	0,00	0,00	Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.

3.1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0,00	0,00	1.001.404,00	0,00	0,00	Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.
3.1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	0,00	1.001.404,00	0,00	0,00	Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.
3.1.1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	451.146.728,00	0,00	0,00	Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si
3.1.1.6	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	0,00	211.553.364,00	0,00	0,00	Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.
3.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Percentase realisasi anggaran	0,29	0,30	12.397.929.294,00	1.841.340.720,00	14,85	Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.
3.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55,00	100,00	11.829.909.638,00	1.739.280.720,00	14,70	Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.
3.1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1,00	8,33	476.760.000,00	102.060.000,00	21,41	Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.
3.1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0,00	0,00	2.888.424,00	0,00	0,00	Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.
3.1.2.4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0,00	0,00	741.404,00	0,00	0,00	Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.
3.1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1,00	8,33	86.368.424,00	0,00	0,00	Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.
3.1.2.6	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0,00	0,00	1.261.404,00	0,00	0,00	Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.
3.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Percentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	0,00	0,00	183.817.722,00	0,00	0,00	Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.
3.1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0,00	0,00	481.404,00	0,00	0,00	Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.
3.1.3.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0,00	0,00	180.370.702,00	0,00	0,00	Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.

3.1.3.3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0,00	0,00	1.482.808,00		0,00	0,00	Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.
3.1.3.4	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0,00	0,00	1.482.808,00		0,00	0,00	Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.
3.1.4	Administrasi Kepegawaiannya Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	6,12	20,41	111.417.712,00		0,00	0,00	Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.
3.1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0,00	0,00	50.233.500,00		0,00	0,00	Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.
3.1.4.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0,00	0,00	481.404,00		0,00	0,00	Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.
3.1.4.3	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0,00	0,00	481.404,00		0,00	0,00	Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.
3.1.4.4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3,00	15,00	60.221.404,00		0,00	0,00	Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.
C	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum	0,00	0,00	3.406.720.820,00		126.620.564,00	3,72	Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.
3.1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0,00	0,00	2.386.618,00		0,00	0,00	Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.
3.1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0,00	0,00	793.261.304,00		0,00	0,00	Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.
3.1.5.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0,00	0,00	145.167.700,00		1.945.400,00	1,34	Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.
3.1.5.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	1.941.087.450,00		124.675.164,00	6,42	Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.
3.1.5.5	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0,00	0,00	289.521.404,00		0,00	0,00	Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.
3.1.5.6	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0,00	0,00	235.296.344,00		0,00	0,00	Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.
3.1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang diadakan	0,00	0,00	3.056.830.404,00		0,00	0,00	Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.
3.1.6.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0,00	0,00	2.881.793.386,00		0,00	0,00	Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.
3.1.6.2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0,00	0,00	175.037.018,00		0,00	0,00	Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.

3.1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	8,00	8,00	915.886.432,00	259.370.243,00	28,32	Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.
3.1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	0,00	30.034.000,00	0,00	0,00	Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.
3.1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1,00	8,33	181.735.120,00	14.721.319,00	8,10	Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.
3.1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1,00	8,33	704.117.312,00	244.648.924,00	34,75	Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.
3.1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	0,00	0,00	367.180.999,00	13.701.190,00	3,73	Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.
3.1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas labatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0,00	0,00	72.741.999,00	5.950.200,00	8,18	Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.
3.1.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0,00	0,00	154.939.000,00	7.750.990,00	5,00	Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.
3.1.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0,00	0,00	39.800.000,00	0,00	0,00	Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.
3.1.8.4	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0,00	0,00	99.700.000,00	0,00	0,00	Ahmad Firdaus Kurniawan, S.Sos., M.Si.
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR				103.447.240.000,00	2.637.106.955,00	2,55		

KEPALA BADAN

Drs. H. Sufian Agus, M.Si
NIP. 196602041988031016